

BAB II

GAMBARAN PEREMPUAN DALAM DOMINASI PATRIARKI

Wacana tentang feminisme cenderung muncul karena posisi perempuan yang sering tersisihkan atau memprihatinkan maupun juga sering menjadi korban dari suatu sistem, kondisi tersebut yang kemudian memunculkan adanya wacana tentang gender, di mana konsep gender tersebut merujuk pada konstruksi sosial tentang tanggung jawab laki- laki dan perempuan dalam masyarakat. Laki- laki dan perempuan lahir dengan begitu banyak perbedaan baik itu secara sifat maupun bentuk tubuh. Perbedaan laki- laki dan perempuan yang berkembang dan berlaku di masyarakat tidak hanya perbedaan secara biologis saja, artinya identitas seseorang untuk disebut laki- laki atau perempuan tidak cukup hanya mengacu pada perbedaan jenis kelamin. Berdasarkan hasil interpretasi masyarakat maka mereka membuat atau mengonstruksi seperangkat fungsi dan kemampuan masing- masing jenis kelamin dengan mengacu pada sistem sosial budaya yang bersangkutan yang juga mengalami perkembangan (Haryanto dkk, 2017: 4.4).

Konsep gender pertama kali dikemukakan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri- ciri fisik biologis. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki- laki dan perempuan yang tercermin dalam perilaku, keyakinan dan organisasi. Laki- laki dikenal sebagai seseorang yang kuat, jantan, rasional, tidak cengeng sedangkan perempuan cenderung diasosiasikan

sebagai seseorang yang cengeng, emosional, keibuan dan cantik. Gender merupakan konstruksi masyarakat sehingga seseorang akan dibentuk oleh masyarakat dan budayanya sejak ia dilahirkan, dengan demikian munculah peran apa yang dianggap pantas dan tidak pantas untuk dilakukan oleh perempuan dan laki- laki. Hal tersebut menimbulkan adanya pemahaman bahwa perempuan berperan dalam wilayah domestik dan laki- laki di wilayah publik, maka dasar hubungan sosial yang terjadi atas dasar peran gendernya masing- masing (Haryanto dkk, 2017: 4.6).

Masyarakat Indonesia banyak disugahi berbagai gambaran dalam iklan, sinetron, film dan buku sekolah yang meletakkan perempuan di dalam rumah dan laki- laki diluar rumah. Dalam kenyataannya ada juga gambaran posisi perempuan yang di luar rumah dan laki- laki yang di dalam rumah. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar berperan dalam masyarakat. Selama dalam proses sosialisasi ia akan mempelajari cara bekerja sama dengan individu lainnya, mengikuti nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, dan melaksanakan perannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Menurut Kamanto Proses sosialisasi gender seperti juga halnya pada proses sosialisasi pada umumnya. Di mana dalam sosialisasi gender dikenal juga peranan dari para agen sosialisasi gender diantaranya adalah keluarga, teman, atau kelompok bermain, sekolah serta media massa. Sosialisasi gender yang terjadi akan menimbulkan adanya perbedaan gender (*gender differences*), di mana proses adanya perbedaan gender memakan waktu yang lama. Hal itu disebabkan perbedaan tersebut dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan

di konstruksi melalui ajaran keagamaan maupun negara (Haryanto dkk, 2017: 4.7-4.10).

Perbedaan jenis kelamin antara laki- laki dan perempuan menyebabkan timbulnya perbedaan gender, ketika perbedaan tersebut mengakibatkan munculnya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dan ketidakadilan gender terjadi baik pada kaum laki- laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender bermanifestasi dalam bentuk marginalisasi, subordinasi dalam keputusan politik, stereotip, kekerasan serta beban kerja yang berlebihan, di mana semua itu memiliki keterkaitan satu sama lain, saling mempengaruhi dan tidak ada bentuk manifestasi yang lebih penting daripada bentuk lainnya (Haryanto dkk, 2017: 4.12- 4.17).

1. Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi merupakan suatu proses terjadinya peminggiran suatu kelompok baik karena struktur kekuasaan, penggusuran, kebijakan pemerintah, tafsir agama, keyakinan, tradisi atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan. Pada umumnya proses marginalisasi ini menyebabkan kemiskinan dan dalam hal ini pemiskinan pada satu jenis kelamin yaitu perempuan.

Proses marginalisasi perempuan terjadi dalam kultur, birokrasi maupun program- program pembangunan. Dengan hanya mengakui laki- laki sebagai “kepala rumah tangga” program industrialisasi pertanian secara sistematis menghalangi, tidak memberi ruang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pelatihan dalam bidang pertanian ataupun akses kredit. Perlakuan semacam itu

secara tidak terasa menggeser keberadaan kaum perempuan ke garis marginal. Di sektor lain juga terjadi banyak sekali jenis aktivitas kaum perempuan yang dianggap tidak produktif (dianggap bernilai rendah), sehingga mendapat imbalan ekonomis lebih rendah (Fakih, 2001: 149).

2. subordinasi

Subordinasi mengacu pada proses menempatkan suatu kelompok pada suatu posisi yang dianggap sebagai tambahan, tidak penting ataupun juga tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan adanya anggapan perempuan sebagai *the second sexes*. Perempuan dianggap tidak mampu menjadi seorang pemimpin karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional dan terlalu emosional sehingga karena itu perempuan diletakkan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk antara lain perempuan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan seperti laki-laki ataupun dalam bidang pekerjaan.

Perbedaan dan pembagian gender yang mengakibatkan termanifestasi dalam posisi subordinasi kaum perempuan di hadapan laki-laki. Subordinasi disini berkaitan dengan politik terutama menyangkut soal proses pengambilan keputusan dan pengendalian kekuasaan. Subordinasi tersebut tidak saja secara khusus terdapat dalam birokrasi pemerintahan, masyarakat maupun di masing-masing rumah tangga, tetapi juga secara global (Fakih, 2001: 148).

3. Stereotipe

Stereotipe sebenarnya berkaitan dengan pemberian cap, julukan atau label pada suatu kelompok atau individu, di mana pemberian stereotipe itu lebih banyak memberikan dampak yang merugikan pada kelompok atau individu tersebut sehingga yang muncul dipermukaan adalah adanya ketidakadilan yang dialami oleh sekelompok orang. Stereotipe gender lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan dengan laki- laki sehingga menimbulkan adanya ketidakadilan pada perempuan. sebagai contoh, pada kasus perkosaan sering kali muncul asumsi di masyarakat bahwa sebenarnya penampilan perempuan itu sendirilah yang membuat mereka diperkosa. Adanya stereotipe bahwa perempuan itu suka bersolek serta memakai pakaian ketat dan rok mini itulah yang dianggap memancing perhatian dan nafsu laki- laki, karena pada dasarnya tidak semua korban perkosaan itu yang memakai pakaian ketat dan bersolek.

Stereotipe merupakan satu bentuk penindasan ideologi dan kultural, yakni pemberian label yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat kepada posisi dan kondisi kaum perempuan. akibatnya, jika mereka hendak aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sebagai bidang kegiatan laki- laki seperti kegiatan politik, bisnis ataupun di pemerintahan, maka dianggap bertentangan atau tidak sesuai dengan kodrat perempuan. sementara stereotipe laki- laki sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh kaum perempuan dianggap sebagai “sambilan atau tambahan” dan cenderung tidak dihitung, tidak dianggap atau tidak dihargai (Fakih, 2001: 149).

4. Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan serangan atau invasi atau *assault violence*. Adanya kekerasan pada perempuan ini disebabkan oleh adanya ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat antara laki- laki dan perempuan. Fakih mengemukakan bahwa terdapat beberapa bentuk dari *gender related violence*, salah satunya adalah pelecehan seksual yang merupakan suatu tindakan yang dianggap tidak menyenangkan bagi kaum perempuan, tetapi terkadang pihak pelaku pelecehan seksual terutama laki- laki beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah suatu lelucon bukan bertujuan untuk menyakiti perempuan. lelucon atau bukan, bukanlah menjadi isu yang utama tetapi adanya suatu tindakan yang cenderung merendahkan perempuan dan membuat perempuan itu merasa tidak nyaman, itulah yang dianggap suatu pelecehan.

5. Beban Kerja

Perempuan memiliki beban kerja yang lebih banyak dibandingkan laki- laki, di mana sebagian besar pekerjaan itu bukan pekerjaan yang produktif atau yang menghasilkan uang. Seperti halnya pekerjaan domestik, seperti menyapu, mengepel, mencuci dan lain sebagainya. Karena perempuan lebih banyak mengerjakan pekerjaan domestik dibandingkan laki- laki maka anggapan yang muncul di masyarakat adalah bahwa pekerjaan domestik adalah pekerjaan perempuan. pekerjaan domestik tidak menghasilkan uang maka cenderung dianggap memiliki nilai lebih rendah.

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Akan tetapi perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan seperti tersebut diatas (Fakih, 2001: 12).

Proses ketidakadilan gender terjadi dalam berbagai tingkatan kelompok masyarakat mulai dari yang terbesar yaitu negara sampai unit terkecil, yaitu keluarga. Contoh ketidakadilan gender dalam institusi pendidikan misalnya dalam buku sekolah masih kentalnya perbedaan ketidakadilan gender di mana perempuan selalu diposisikan sebagai pekerja di lingkungan domestik dan laki-laki sebagai pekerja produktif. Dalam institusi agama dan institusi budaya, masih banyak nilai-nilai dan tafsir agama yang memosisikan perempuan sebagai orang yang berjalan di belakang laki-laki yang artinya bahwa perempuan berada dalam posisi tidak penting, dan bukannya berjalan berdampingan sebagai partner yang seimbang. Ketidakadilan gender akan semakin langgeng ketika sosialisasi yang terjadi di keluarga masih berdasarkan ketidakadilan gender yang kemudian ketidakadilan gender menjadi suatu ideologi dan keyakinan pada masing-masing orang (Haryanto dkk, 2017: 4.18).

Pelanggengan posisi subordinasi, stereotipe dan kekerasan terhadap kaum perempuan ini secara tidak sadar juga dijalankan oleh ideologi dan kultur patriarki. Beberapa hal bisa disimpulkan dari refleksi ini, pertama bahwa memperjuangkan

perempuan tidak sama dengan perempuan melawan laki- laki. Persoalan penindasan terhadap perempuan bukanlah persoalan kaum laki- laki, melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender adalah salah satunya. Gerakan transformasi kaum perempuan adalah suatu proses gerakan untuk menciptakan hubungan antara sesama manusia yang secara fundamental lebih baik dan baru. Beberapa agenda untuk mengakhiri sistem yang tidak adil diantaranya (Fakih, 2001: 151-153):

1. Melawan hegemoni yang merendahkan perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi, yang artinya mempertanyakan kembali segala sesuatu yang menyangkut nasib perempuan di mana saja, pada tingkat dan dalam bentuk apa saja. Menurut Weiler melakukan pendidikan yang sifatnya kritis atau kegiatan apa saja yang akan membantu perempuan memahami pengalamannya dan menolak ideologi dan norma yang dipaksakan kepada mereka. Tujuan upaya tersebut adalah untuk membangkitkan kesadaran kritis gender yakni kesadaran akan ideologi hegemoni dominan dan kaitannya dengan penindasan gender.

2. Melawan paradigma *developmentalism* yang berasumsi bahwa keterbelakngan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Karena perempuan dianggap tidak mampu memecahkan masalahnya sendiri. Perempuan dianggap sebagai objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur dan diprogramkan. Perempuan juga dianggap sebagai objek pengembangan pengetahuan mereka. Riset terhadap perempuan adalah juga proses dominasi. Dengan demikian perjuangan perempuan termasuk senantiasa

mempertanyakan dominasi elit yang menggunakan pengetahuan dan siskursus pembangunan dari hegemoni kapitalisme dan modernisasi.

Masalah gender adalah masalah yang sangat intens, di mana kita terlibat secara emosional. Banyak terjadi perlawanan manakala perjuangan ketidakadilan gender diaktifkan, karena menggugat masalah gender sesungguhnya juga berarti menggugat *privilege* yang kita dapatkan dari adanya ketidakadilan gender. Pemecahan masalah gender dapat dilakukan dengan upaya- upaya program aksi yang melibatkan perempuan agar mereka mampu mengatasi masalahnya sendiri. Misalnya dalam mengatasi masalah marginalisasi perempuan, perlu melibatkan kaum perempuan dalam program pengembangan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang memungkinkan kaum perempuan terlibat dan menjalankan kekuasaan di sektor publik. Untuk menghentikan masalah kekerasan, pelecehan dan pelbagai stereotipe terhadap kaum perempuan, suatu aksi jangka pendek juga mulai perlu digalakkan. Kaum perempuan sendiri harus mulai memberikan pesan penolakan secara tegas kepada mereka yang melakukan kekerasan dan pelecehan tersebut berhenti. Membiarkan dan menganggap biasa terhadap kekerasan dan pelecehan berarti mengajarkan dan bahkan mendorong pelaku untuk melanggengkannya. Perlu dikembangkan kelompok perempuan yang memungkinkan mereka saling membahas dan saling membagi rasa pengalaman untuk berperan menghadapi masalah kekerasan dan pelecehan. Kegiatan praktis jangka pendek adalah mempelajari pelbagai teknik oleh kaum perempuan sendiri guna menghentikan kekerasan, pemerkosaan dan pelecehan. Misalnya dengan mencatat setiap kejadian, termasuk sikap responsi yang diterima, secara jelas kapan

dan di mana. Catatan ini yang akan berguna jika peristiwa tersebut diproses secara hukum. Usaha perjuangan strategis jangka panjang juga perlu dilakukan untuk memperkuat usaha praktis tersebut. Misalnya dengan melancarkan kampanye kesadaran kritis dan pendidikan umum masyarakat untuk menghentikan pelbagai bentuk ketidakadilan gender (Fakih, 2001: 154-157).

Sebuah artikel REMOTIVI mengenai stereotipe perempuan dalam media, salah satu isi artikel membahas Konferensi regional perempuan Beijing+20 di Bangkok tahun 2014, serta konferensi yang sama di tingkat internasional di New York tahun 2015, stereotipe perempuan di media merupakan salah satu pembahasan utama. Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara peserta dalam konferensi yang diadakan PBB. Dalam putusannya, konferensi di tingkat regional Asia Pasifik kemudian mengeluarkan putusan untuk klausul perempuan dan media. Putusan tersebut berbunyi: “Pemerintah akan menjamin tidak adanya stereotipe di media yang mengakibatkan pada diskriminasi terhadap perempuan di media, dan pemerintah akan membuka partisipasi terhadap perempuan di media dan dalam menggunakan teknologi. Pemerintah juga memastikan tidak terjadi kesenjangan dalam penggunaan teknologi dan adanya kebebasan berekspresi”. Hal ini menandakan bahwa persoalan yang terjadi di media di Indonesia serta komitmen pemerintah mencakup tiga persoalan yang harus dilakukan pemerintah untuk memperbaiki nasib perempuan melalui media. Pertama, pemerintah harus menjamin adanya partisipasi yang melibatkan perempuan dan kelompok rentan dalam media. Kedua, pemerintah harus menjamin adanya perbaikan pada nasib buruh perempuan media. Ketiga, pemerintah harus menjamin bahwa media tidak

digunakan untuk kepentingan ekonomi- politik pemilik media semata (Luviana, 2015:1).

Artikel tersebut menandakan bahwa pemerintah menjamin nasib buruh perempuan media, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua hal dijamin oleh pemerintah. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengungkapkan bahwa perempuan yang bekerja di media masih mengalami diskriminasi. Menurut Staf Divisi Perempuan AJI Indonesia Nani Afrida, salah satu bentuk diskriminasi adalah prioritas penempatan jurnalis laki- laki untuk liputan menantang, sedangkan jurnalis perempuan umumnya ditempatkan di desk kesehatan atau gaya hidup. Nani juga mengungkapkan bahwa pos-pos penting yang dianggap “maskulin” seperti pertahanan atau kepolisian, mayoritas ditempatkan oleh jurnalis laki- laki. Bentuk diskriminasi lainnya adalah pengambilan keputusan di *Newsroom* umumnya didominasi laki- laki. Nani juga menyatakan tentang minimnya fasilitas yang diberikan untuk jurnalis perempuan, seperti kesehatan reproduksi, insentif dan asuransi. Tidak hanya itu perempuan yang bekerja di dunia pertelevisian seperti jurnalis, reporter maupun presenter sering mengalami pelecehan. Seperti digoda, diajak kencan atau kontak fisik. survey yang dilakukan oleh International Federation Journalist (IFJ) mengungkapkan bahwa 66 persen jurnalis perempuan di dunia mengalami pelecehan. Nani juga mengungkapkan bahwa setiap tahun ada jurnalis perempuan yang dibunuh, diserang, diancam, dipenjarakan, dilecehkan, bukan karena pekerjaan mereka, tapi karena diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan (Nupus, Hayati, 2019:1).

Gender adalah konstruksi masyarakat yang menempatkan, memosisikan subjek dengan tubuh perempuan dengan “keharusan” untuk memiliki gender yang sama dengan tubuhnya. Gender bagi subjek perempuan adalah feminin. Femininitas ini tidaklah kodrati dan karena itu dapat berbeda- beda dari satu budaya ke budaya lain. Simone de Beauvoir mengajukan suatu argumen bahwa tubuh itu lebih dari sekadar *facticity*. Sebagai seorang manusia, perempuan adalah subjek, suatu kesadaran, tetapi sebagai seorang perempuan dia adalah “Liyang yang Mutlak”. Dia adalah objek. Kontradiksi antara menjadi subjek dan pada saat yang sama dihadapkan pada objektivikasi, seorang perempuan mungkin mendapatkan dirinya menjadi kaki tangan kejahatan terhadap dirinya sendiri dengan cara melarikan diri dari tanggung jawab menjadi manusia yang bebas, suatu subjek. Bagi Beauvoir, tubuh bukanlah batasan dan wadah, tetapi merupakan *grasp*, suatu sentuhan kepada dunia. Dalam sentuhan suatu subjek menyentuh dan pada saat yang sama disentuh. Dengan demikian subjek merupakan objek pada waktu yang bersamaan (Prabasmoro, 2006:43-46).

Pembedaan seks atau gender merupakan salah satu pendekatan penting dalam pemikiran feminis. Pembedaan itu merupakan bingkai pikir yang sangat berguna untuk menjelaskan bahwa situasi opresif yang dihadapi perempuan bukanlah suatu taksir dan bukan juga merupakan suatu hal yang alamiah. Secara umum, konstruk “biologi-adalah-sosial” adalah sebagaimana didefinisi Rubin dalam apa yang disebutnya sebagai “sistem seks/ gender”, yaitu “suatu rangkaian pengaturan yang digunakan oleh masyarakat untuk mentransformasi seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia dan di dalam kegiatan ini kebutuhan

seksual yang telah ditransformasi ini dapat dipenuhi”. Rubin juga memandang bahwa seorang perempuan adalah tubuh ditambah konstuk sosial kultural yang diinvestasikan kepada tubuhnya. Logika perbedaan seks/gender dalam masyarakat menghasilkan konstruk yang mensituasikan bahwa perempuan adalah “perempuan secara biologis” dan karena itu harus menjadi feminin, yang bermakna “perempuan secara sosio kultural” (Prabasmoro, 2006:51-52).